

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI
PENGUNA NARKOTIKA
Praktek Persidangan dan Eksekusi di Pengadilan Negeri Surabaya**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



OLEH :

Leny Eka Novitiyaningsih
NPM . 0671010066

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
SURABAYA**

2010

HALAMAN REVISI SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PENGGUNA
NARKOTIKA**

Praktek Persidangan dan Eksekusi di Pengadilan Negeri Surabaya

Disusun oleh :


LENY EKA NOVITIYANINGSIH
NPM. 0671010066

**Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal : 24 Juni 2010**

Tim Penguji :

Tanda Tangan

1 Prof. Dr. Indrati rini, SH.MS
NIP. 130 936 179

(KETUA) : 1. 

2. Haryo Sulistiyantoro, SH.MM
NIP. 19620625 199103 1 001

(ANGGOTA 2. 

3. Sutrisno, SH.M.Hum
NIP. 19601212 198803 1 001

(ANGGOTA 3. 

Mengetahui

DEKAN



Haryo Sulistiyantoro, S.H., M.M
NIP. 19620625 199103 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PENGGUNA
NARKOTIKA**

Praktek Persidangan dan Eksekusi di Pengadilan Negeri Surabaya

Disusun oleh :

LENY EKA NOVITIYANINGSIH
NPM. 0671010066

**Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa
Timur**

Pada tanggal : 10 Juni 2010


Tim Penguji :

1. Prof. Dr. Indrati rini, SH.MS
NIP. 130 936 179


2. Haryo Sulistiyantoro, SH.MM
NIP. 19620625 199103 1 001

3. Sutrisno, SH.M.Hum
NIP. 19601212 198803 1 001

Tanda Tangan

(KETUA) : 1. 

(ANGGOTA 2. 

(ANGGOTA) 3.  ..

Mengetahui

DEKAN



Haryo Sulistiyantoro, S.H., M.M
NIP. 19620625 199103 1 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahahirabbil'aalamiin, segala puji bagi Allah SWT, Hanya kepadaNya-lah syukur dipanjatkan atas selesainya skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PENGGUNA NARKOTIKA PRAKTEK PERSIDANGAN DAN EKSEKUSI DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA”**. Selesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak selama proses penyelesaian skripsi itu, penulis “wajib” mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Teguh Sudarto, MP selaku Rektor UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Haryo Sulistiyantoro, S.H., MM selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II
4. Bapak Subani, S.H.,M.Si selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Nyoman Gede Wirya S.H., M.H selaku ketua Pengadilan Negeri Surabaya.
6. Bapak H.Soeli.S.H., M.H selaku Panitera Muda pidana di Pengadilan Negeri Surabaya.
7. Ibu Munawaroh. S.H selaku SUBAG TU di LAPAS Klas II-A Blitar.
8. Bapak H. Sutrisno, SH., M.Hum selaku pembimbing utama yang memiliki empati terhadap kondisi penulis.
9. Ibu Yana Indawati, SH., M.Kn sebagai dosen pembimbing pendamping yang meluruskan kesalahan-kesalahan penulis.
10. Bapak Khusnul Hadi, SH, MS selaku dosen wali yang bersedia ‘direpoti’ untuk masalah penulis selama kuliah di Progdi Ilmu Hukum tercinta ini.

11. Ibu Prof. Dr. Indrati Rini, SH.MS selaku ketua Tim penguji beserta bapak Haryo Sulistiyantoro, SH,MM dan bapak Sutrisno, SH,MHum selaku anggota tim penguji yang telah memberikan evaluasi, kritikan dan masukan yang berarti bagi penulis.
12. Ayahku bapak Suwadi dan Ibuku Martini serta adikku Saroky di rumah dan seluruh keluargaku yang telah memberikan dorongan dan semangat.
13. Seluruh Pegawai Pengadilan yang berada di bagian Pidana Biasa dan di Ruang Kearsipan di Pengadilan Negeri Surabaya terutama buat pak Michael dan pak Widodo, terima kasih atas bantuannya serta pegawai lainnya yang turut membantu yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya dalam penyusunan skripsi ini.
14. Seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.
15. Sahabat-sahabat dekatku Maya, Kiki, Reni, Amanda, Wahib, Putu, Doni, Fajar, Rio yang telah membantu dan memberikan saran dalam pembuatan skripsi hingga selesai.

Sungguh penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna dan penuh keterbatasan, maka saran serta kritik yang membangun sangatlah dibutuhkan untuk memperbaiki kekurangan yang ada.

Surabaya, Juni 2010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Perumusan Masalah	3
3. Tujuan Penelitian	3
4. Manfaat Penelitian	3
5. Kajian Pustaka	5
6. Metode Penelitian	20
a. Jenis dan Tipe Penelitian	20
b. Sumber Data	20
c. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	21
d. Metode Analisis Data	22
7. Sistematika Penulisan	22
BAB II PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK PENGGUNA NARKOTIKA	24
1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak	24

2. Praktek Persidangan Atas Pertanggungjawaban Pidana Anak	24
3. Eksekusi Pengadilan Anak	28
4. Kasus Penggunaan Narkotika	30
a. Kasus Posisi.....	30
b. Pertimbangan Hukum	30
c. Analisis Hukum	32

BAB III DAMPAK NEGATIF DAN POSITIF PENERAPAN SANKSI

PIDANA TERHADAP ANAK PENGGUNA NARKOTIKA 39

1. Dampak Negatif Pidana Penjara Terhadap Perkembangan Anak	39
2. Dampak Positif Dari Penerapan Sanksi Pidana Penjara Anak	41
3. Realitas terpidana anak di Lembaga Perasyarakatan	43
4. Proses Pembinaan Narapidana Anak di LP Anak	45

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN..... 50

1. Kesimpulan	50
2. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN :

1. Surat Ijin Penelitian
2. Ikhtisar Putusan
3. Surat Bapas Dari Pihak Kepolisian
4. Laporan Penelitian Bapas
5. Surat Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan

6. Kartu Data Eksekusi
7. Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan
8. Surat Labfor Dari Kepolisian

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jenis Sanksi Pidana yang Dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Kepada Anak yang Menyalahgunakan Narkotika Tahun 2009	34
Tabel 2	Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Penjara Kepada Anak Yang Menyalahgunakan Narkotika Tahun 2009	37
Tabel 3	Jadwal Kegiatan Anak Lapas Klas II A-Blitar	44

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi anak-anak pengguna narkoba dalam praktek persidangan dan eksekusi di Pengadilan Negeri Surabaya, dan mengetahui dampak negatif dari penerapan sanksi pidana bagi anak penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, sumber data diperoleh dari literatur-literatur, karya tulis ilmiah, perundang-undangan yang berlaku dan data-data dari Pengadilan Negeri Surabaya, analisa data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Seorang anak dapat dikatakan mampu bertanggung jawab apabila anak tersebut mengerti akan akibat perbuatannya sehingga anak dapat diajukan ke sidang pengadilan anak jika anak berusia minimal 8 tahun dan maksimal 18 tahun dan untuk dilakukan pembinaan agar menjadi manusia yang lebih baik lagi di dalam LAPAS.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban pidana anak, Narkoba, pembinaan anak.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika oleh anak saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Bahkan, masalah penyalahgunaan narkotika menjadi perhatian berbagai kalangan. Hampir semuanya mengingatkan sekaligus menginginkan agar masyarakat Indonesia, utamanya anak-anak untuk tidak sekali-kali mencoba dan mengkonsumsi “mahkluk” yang disebut dengan narkotika. Fakta yang disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata peredaran narkotika telah merebak kemana-mana tanpa pandang usia, terutama di antara generasi penerus bangsa dalam membangun Negara di masa mendatang.

Keadaan ini semakin diperparah dengan ditemukannya penyalahgunaan narkotika sampai keranah pendidikan yang semestinya steril dari peredaran narkotika, biarpun jenis narkotika yang dipakai siswa-siswa itu masih memakai jenis narkotika yang ringan, tetapi hal tersebut dapat mengakibatkan kecanduan yang lambat laun akan meningkatkan dosis takarannya. Akibat penggunaannya yang secara terus menerus akhirnya kesehatan jasmani dan rohani para pencandu itu akan semakin melemah, gairah belajarnya akan semakin menurun dan otaknya pun kian tumpul, jika sudah demikian, bagaimana jadinya masa depan mereka. Anak dengan kondisinya yang khas dan perkembangan jiwa dan mentalnya yang belum matang, ternyata tetap berpeluang untuk melakukan kejahatan atau

melakukan pelanggaran hukum termasuk melakukan penyalahgunaan narkotika.

Penerapan sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana narkotika berbeda dengan orang dewasa. Perhitungan pidana yang dijatuhkan kepada anak-anak adalah $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa dan dalam hal melakukan secara bersekongkol atau bekerja sama dapat ditambah $\frac{1}{3}$ dari pidana yang berlaku.

Penyalahgunaan narkotika belakangan ini banyak dilakukan oleh anak-anak. Usia anak-anak merupakan “sasaran empuk” dan wilayah paling rawan terhadap penyalahgunaan narkotika, karena masa anak-anak merupakan masa pencarian identitas diri, saat dimana anak-anak mulai muncul rasa penasaran, ingin mengetahui serta ingin mencoba berbagai hal baru dan bahkan beresiko tinggi, oleh karenanya, sangat mungkin jika semakin hari semakin bertambah jumlah tindak pidana kejahatan narkotika untuk pengedar dan pemakai dikalangan anak-anak.

Satu kasus yang berhasil di ungkap oleh kepolisian Reserse Polres Surabaya Utara dengan tersangka bernama SETYO APRILIANTO, jenis kelamin laki-laki, umur 16 tahun, pekerjaan pelajar, alamat jalan Dukuh Pakis Gg VI D1/12 Surabaya, pada hari selasa tanggal 12 Juli 2009 sekira jam 00.15 Wib di jalan Dukuh Kupang Surabaya (Pos Kamling), yang mana narkotika jenis Ganja tersebut dicampur kedalam sebatang rokok yang dibakarnya lalu dihisap (seperti menghisap rokok) sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) ayat a undang-undang Nomor 22 Tahun 1997

(selanjutnya disingkat dengan UU Narkotika). Demikian juga dikemukakan oleh Penyidik Reserse narkoba (Sat Reskoba) AIPTU Sudjatkiko, bahwa terdapat beberapa faktor penyebabnya anak-anak terlibat penyalahgunaan narkotika, diantaranya karena salah pergaulan dalam lingkungan masyarakat, sebagai imbas dari perkembangan kemajuan komunikasi dan transportasi sehingga adanya perubahan sikap dari anak-anak untuk meniru dan mencoba-coba, termasuk meniru dan mencoba menggunakan narkotika secara tidak benar atau melakukan penyalahgunaan narkotika.¹

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi anak pengguna narkotika?
- b. Apa dampak negatif dan positif penerapan sanksi pidana terhadap anak pengguna narkotika?

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi bagi anak pengguna narkotika.
2. Untuk mengetahui dampak negatif dan positif, penerapan sanksi terhadap anak pengguna narkotika.

4. Manfaat Penelitian

¹ Biodata Polres Surabaya Utara, 28 Juli 2009.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini :

- a. Agar pengguna narkoba sadar akan bahaya yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba secara terus menerus tanpa adanya resep dokter yang beakibat pada kematian bagi si pengguna.
- b. Agar para pengedar narkoba sadar akan bahaya yang ditimbulkan dari tindakannya mengedarkan narkoba secara illegal kepada anak-anak bangsa, karena semua itu akan merusak generasi bangsa Indonesia.
- c. Agar pihak Kepolisian dapat meminimalisir peredaran narkoba dan memberantas segala bentuk tindak pidana narkoba di Indonesia dengan menangkap para Bandar dan pengedar yang sering melakukan transaksi penjualan narkoba secara terselubung baik di dalam maupun luar negeri.
- d. Agar Hakim dapat menjatuhkan sanksi yang seberat-beratnya kepada para Bandar dan pengedar narkoba dan untuk para pengguna hendaknya diberikan sanksi rehabilitasi saja, karena pengguna tidak hanya semata-mata sebagai pelaku tindak pidana narkoba saja, tetapi mereka juga sebagai korban dari penyalahgunaan narkoba tersebut.
- e. Agar Jaksa dapat menuntut hukuman yang seberat-beratnya kepada para Bandar dan Pengedar narkoba.
- f. Agar LP (Lembaga Perasyarakatan) dapat membina para narapidana narkoba untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi dengan diberikan

pembekalan agama, pendidikan dan keterampilan dan pada saat bebas mereka dapat diterima oleh masyarakat luas.

5. Kajian Pustaka

a. Tindak Pidana dan Tindak Pidana Narkotika.

Peristiwa pidana yang juga disebut sebagai tindak pidana (delict) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana / tindak pidana kalau memenuhi unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari :

1. Obyektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Yang dijadikan titik utama dari pengertian obyektif disini adalah tindakannya.

2. Subyektif

Perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).²

Ada beberapa definisi Tindak pidana dari para ahli hukum diantaranya menurut Wiryono Pradjodikoro, didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana, sedang Moelyanto, menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar aturan tersebut. Kedua definisi tersebut mempunyai kesamaan arti yakni adanya

²Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*. PT. RadjaGrafindo Persada. Jakarta. 2005 h.175

perbuatan yang dilanggar sehingga bisa dikatakan sebagai perbuatan pidana.

Kansil, menggunakan istilah delik, yaitu perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.³ Mengenai definisi tindak pidana narkoba itu sendiri tidak terdapat definisi yang baku. Secara garis besar definisi tindak pidana narkoba adalah suatu perbuatan penyalahgunaan narkoba yang pelakunya dapat dikenakan hukuman sesuai dengan perundang-undangan narkoba yang berlaku.

b. Pertanggungjawaban Pidana

Hukum pidana menentukan yang dinamakan dengan pertanggungjawaban pidana yang dibatasi dengan ketentuan-ketentuan UU pertanggungjawaban menjurus pada pemidanaan petindak. Jika telah menentukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang ditentukan dalam UU dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang atau diharuskan. Asas pertanggungjawaban pidana adalah tidak dipidanakan jika tidak ada kesalahan.⁴

Bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai "*toerker baarheid criminal resposibility, criminal liability*". Pertanggungjawaban pidana dimaksud untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan suatu tindak pidana yang terjadi atau

³ Mardani. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT RadjaGrafindo Persada. Jakarta.2008.h.59 dikutip dari CST, Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h.269

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h. 153

tidak.⁵ Seorang anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila umur anak tersebut telah berumur antara 8 (delapan) sampai 18 (delapan belas) tahun. Hal itu telah diatur dalam undang-undang pengadilan anak.

c. Perbuatan pidana:

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan barang siapa yang melanggar larangan tersebut maka akan dikenakan sanksi pidana yang berupa pidana tertentu. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

d. Sanksi

Pengertian Sanksi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanggungan (tindakan-tindakan, hukuman, dsb) untuk memaksa orang menepati perjanjian dan menaati ketentuan perundang-undangan, sedangkan menurut Terminologi Hukum Pidana, sanksi pidana adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.⁶

e. Narkotika

Secara etimologis narkotika berasal dari bahasa inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius. Secara terminology, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba atau

⁵ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, h. 221

⁶ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 138

narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.

Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek *stupor* atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan indikasi atau kecanduan.

Menurut ketentuan Undang-Undang Narkotika pasal 1 ayat (1) : “ Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya ras, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

f. Anak

Menurut ketentuan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak (selanjutnya disingkat dengan UU Perlindungan Anak) Pasal 1 ayat (1) : Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun , termasuk anak yang masih didalam kandungan. Sedangkan menurut Undang-undang Pengadilan Anak ketentuan pasal 1 :

- Ayat (1) : Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- Ayat (2) : Anak nakal adalah :
- a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau

- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

g. Jenis Sanksi Pidana dan Tindakan Bagi Anak Nakal

Berlakunya Undang-Undang Nomor.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (selanjutnya disingkat dengan UU Pengadilan Anak) antara lain telah menetapkan apa yang dimaksud anak. Undang-undang ini berlaku *lexspecialis* terhadap KUHP, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dengan adanya UU Pengadilan Anak, menjadi acuan pula dalam perumusan pasal-pasal KUHP baru berhubungan dengan pidana dan tindakan bagi anak. Dengan demikian, tidak akan terjadi tumpang tindih atau saling bertentangan.

UU Pengadilan Anak menyatakan *bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (pasal 1 butir 1)*. Yang dimaksud anak nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Apabila kita kaitkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan maka status anak nakal tersebut berdasarkan putusan pengadilan dapat sebagai anak pidana atau anak negara. Disebut *anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lembaga*

permasyarakatan (LP) anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Kemudian sebagai anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di LP anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Menurut UU Pengadilan Anak terhadap anak nakal dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan. Berdasarkan pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UU Pengadilan Anak diatur pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak nakal.

1. Pidana pokok

Ada beberapa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, yaitu:

- a. Pidana penjara,
- b. Pidana kurungan,
- c. Pidana denda, atau
- d. Pidana pengawasan.

2. Pidana tambahan

Seperti telah disebutkan bahwa selain pidana pokok maka terhadap anak nakal dapat juga dijatuhi pidana tambahan yang berupa :

- a. Perampasan barang-barang tertentu, dan atau
- b. Pembayaran ganti rugi.

3. Tindakan

Beberapa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal menurut pasal 24 ayat (1) UU Pengadilan Anak adalah :

- a. Mengembalikan kepada orang tua asuh.

- b. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, atau
- c. Mengerahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan pelatihan kerja.

Selain tindakan tersebut, Hakim dapat memberikan teguran dan menetapkan syarat tambahan. Teguran adalah peringatan dari hakim baik secara langsung terhadap anak yang dijatuhi tindakan maupun secara tidak langsung melalui orang tua, wali, atau orang tua asuhnya agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya. Syarat tambahan itu misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada pembimbing kemasyarakatan didasarkan pada penjelasan Pasal 24 ayat (2) UU Pengadilan Anak.

Penjatuhan tindakan oleh Hakim dilakukan kepada anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, menurut peraturan perundang-undangan. Namun, terhadap anak yang melakukan tindak pidana, hakim menjatuhkan pidana pokok dan atau pidana tambahan atau tindakan.

Pada segi usia, pengenaan tindakan terutama bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) tahun sampai 12 (dua belas) tahun. Terhadap anak yang telah melampaui umur di atas 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Hal itu dilakukan mengingat pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.

Jenis tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak berdasar UU Pengadilan Anak Pasal 24 ayat (1) ternyata lebih sempit (sedikit) apabila dibandingkan dengan rumusan Rancangan KUHP baru. Rumusan pengenaan tindakan terhadap anak (pasal 132 Rancangan KUHP) adalah :

- a. Pengembalian kepada orang tua, wali atau pengasuhnya,
- b. Penyerahan kepada pemerintah atau seseorang,
- c. Keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakan oleh pemerintah atau suatu badan swasta,
- d. Pencabutan surat izin mengemudi,
- e. Rehabilitasi⁷

h.Penerapan Sanksi Pidana Kepada Anak Nakal

1. Pengadilan anak dan perlindungan anak

Pengadilan anak dibentuk memang sebagai upaya pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak secara utuh, serasi, selaras, seimbang. Oleh karenanya, ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak dilakukan secara khusus. Meskipun demikian, hukum acara yang berlaku (KUHP) diterapkan pula dalam acara pengadilan anak, kecuali ditentukan lain dalam UU Pengadilan Anak, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 40 UU Pengadilan Anak.

a. Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Anak

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU Pengadilan Anak yakni Pengadilan Anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum. Meskipun sebagai pengadilan khusus, pengadilan anak bukan berarti berdiri sendiri. Keberadaan pengadilan anak tetap dalam lingkungan pengadilan umum. Hal itu sesuai dengan

⁷Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h.28

yang tersebut dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan hanya ada empat lingkungan peradilan yaitu peradilan umum, agama, militer dan tata usaha Negara.

Mengenai tugas dan kewenangan pengadilan anak (sidang anak) ketentuan Pasal 3 UU Pengadilan Anak menyatakan bahwa sidang anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang. Ketentuan Pasal 21 menegaskan bahwa sidang anak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dalam hal perkara anak nakal.

Pada prinsipnya, tugas dan kewenangan pengadilan anak sama dengan pengadilan perkara pidana lainnya. Meski prinsipnya sama, namun yang tetap harus diperhatikan ialah perlindungan anak merupakan tujuan yang utama. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Selain itu, anak sebagai bagian dari keluarga, merupakan buah hati, penerus dan harapan keluarga. Di situlah letak pentingnya pengadilan anak sebagai salah satu sarana bagi perlindungan anak yang terganggu keseimbangan mental dan sosialnya sehingga menjadi anak nakal.

b. Kekhususan Pengadilan Anak

Ketentuan mengenai penyelenggaraan Pengadilan anak secara khusus, diatur dalam UU Pengadilan Anak. Garis besar kekhususan pengadilan anak antara lain sebagai berikut :

- 1) Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1).
- 2) Aparat penegak hukum yang berperan dalam proses peradilan anak yaitu Penyidik adalah Penyidik Anak, Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak, Hakim adalah Hakim Anak hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir (5), (6) dan (7).
- 3) Hakim, Penuntut Umum, Penyidik dan Penasehat Hukum, serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6.
- 4) Untuk melindungi kepentingan anak pada prinsipnya pemeriksaan perkara anak dilakukan dalam sidang tertutup. Kecuali dalam hal tertentu dapat dilakukan dalam sidang terbuka, misalnya perkara pelanggaran lalu lintas dan pemeriksaan perkara ditempat kejadian perkara hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2).
- 5) Pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan hanya yang ditentukan dalam UU Pengadilan Anak hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22.

- 6) Ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana/anak nakal sesuai dengan Undang-undang Pengadilan Anak.

c. Ketentuan Umur

Pengertian anak nakal ini ada dua kelompok yakni anak yang *melakukan tindak pidana* dan yang melakukan perbuatan yang *terlarang bagi anak*. UU Pengadilan Anak telah merumuskan anak nakal dalam ketentuan Pasal 1 butir (2) yaitu sebagai berikut :

- 1) Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- 2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan hukum lain yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Salah satu tolak ukur pertanggungjawaban pidana bagi anak nakal adalah umur. Dalam hal itu, masalah umur merupakan masalah yang penting bagi terdakwa untuk diajukan dalam sidang anak. Umur dapat berupa umur minimum maupun umur maksimum.

Masalah umur tentunya juga harus dikaitkan dengan saat melakukan tindak pidana. Sehubungan masalah umur, ketentuan Pasal 4 UU Pengadilan Anak menetapkan sebagai berikut :

- 1) Batas umur anak nakal yang dapat diajukan sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

- 2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke sidang anak.

Rumusan di atas menegaskan bahwa batas umur anak nakal minimum adalah 8 (delapan) tahun dan maksimum 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin. Sedangkan maksimum untuk dapat diajukan ke sidang anak adalah umur 21 (dua puluh satu) tahun, asalkan saat melakukan tindak pidana belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Bagaimana apabila tersangka belum berumur 8 (delapan) tahun? Dengan tetap berpegang teguh pada asas praduga tak bersalah dan demi kepentingan/perlindungan anak maka UU Pengadilan Anak, Pasal 5 menentukan sebagai berikut :

- 1) Jika anak yang belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.
- 2) Apabila penyidik berpendapat bahwa anak tersebut masih dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya maka Penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada kedua orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.

- 3) Jika penyidik berpendapat bahwa anak tersebut tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan.

Pengalaman praktek membuktikan terjadinya tindak pidana sering ada unsur penyertaan (*deelmening*). Dalam hal terjadi anak melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau bersama-sama dengan anggota ABRI, ditetapkan oleh pasal 7 sebagai berikut :

- 1) Anak tetap diajukan ke sidang anak
- 2) Orang dewasa diajukan ke sidang orang dewasa
- 3) Anggota ABRI diajukan ke Mahkamah Militer.⁸

i. Hak-Hak Anak Atas Kesejahteraan :

Perlindungan bagi anak yang menyalahgunakan narkoba akan memperoleh perlindungan khusus, perlindungan khusus tersebut bagi anak untuk mendapatkan kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan bagi dan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat, dapat memperoleh sesuatu yang mana dilindungi oleh pemerintah. Dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Undang-undang Kesejahteraan Anak, bab II pasal 2 sampai dengan pasal 6 yang mengatur hak-hak atas kesejahteraan yaitu sebagai berikut :

1. Hak atas kesejahteraan, perawatan, dan bimbingan

anak berhak memperoleh kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di

⁸*Ibid* ., hal. 102

dalam asuhan khusus untuk tumbuh kembang yang wajar (Pasal (2) ayat (1)).

2. Hak anak atas pelayanan

anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan pribadian bangsa, untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna (Pasal (2) ayat (2)).

3. Hak anak atas pemeliharaan dan perlindungan

anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan (Pasal (2) ayat (2)).

4. Hak anak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup.

anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar (Pasal (2) ayat (4)).

5. Hak diberi pelayanan dan asuhan

anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan mendorong guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya (Pasal (6) ayat (1)).

Anak yang melakukan suatu penyalahgunaan narkotika atau seorang pecandu yang mana anak tersebut merupakan anak nakal karena anak tersebut menggunakan narkotika tanpa menggunakan resep dari dokter ataupun tanpa sepengetahuan dan pengawasan dari dokter. Anak yang menyalahgunakan narkotika merupakan anak yang dalam masa pemakaiannya biasanya seorang pecandu. Untuk melaksanakan suatu hukuman terhadap penyimpangan tingkah

atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh banyak faktor, antara lain adanya faktor dari luar dan perkembangan pembangunan yang cepat.

j. Hak Asasi Manusia Menentukan :

Keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 3 UU No.4 Tahun 1979 UU Kesejahteraan Anak. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Pelayanan dan asuhan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan putusan Hakim Pasal 6 UU Kesejahteraan Anak.

Pasal 66 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan :

- (1). Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman-hukuman yang tidak manusiawi.
- (2). Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- (3). Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- (4). Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.

- (5). Setiap anak dirampas kebebasannya berhak mendapat perlakuan manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa.
- (6). Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- (7). Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

6. Metode Penelitian

a. Jenis Dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan “metode penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang”.⁹

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁰ Jadi dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan tipe penelitian menggunakan penelitian hukum diskriptif.

b. Sumber Data

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 52.

¹⁰ *Ibid*, h. 50.

Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu data sekunder. “Data Sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bila perlu bahan hukum tersier. Data sekunder pada dasarnya adalah data normatif terutama yang bersumber dari perundang-undangan”.¹¹

- a. “Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim)”.¹² Bahan penelitian ini terdiri dari beberapa perundang-undangan:

Peraturan Perundang-undangan, yaitu Undang-undang.

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.
7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

- b. “Bahan Hukum Sekunder, yaitu : Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak atau elektronik)”¹³.

- c. “Bahan Hukum tersier, yaitu : bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

¹¹ *Ibidl*, h.151

¹² *ibid*, h. 82

¹³ *Ibid*, h. 82

(contohnya : Rancangan Undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia)”.¹⁴

c. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menganalisis data ini adalah data sekunder yaitu studi kepustakaan, yaitu mempelajari buku-buku, dan Perundang-undangan.

d. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data ini adalah “metode kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian hasilnya akan dimanfaatkan untuk membahas permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini.¹⁵ Yang berjudul pertanggungjawaban pidana anak sebagai pengguna narkoba praktek persidangan dan eksekusi di Pengadilan Negeri Surabaya.

7. Sistematika penulisan

Agar skripsi ini memenuhi syarat sebagai karya tulis ilmiah serta untuk memudahkan dalam memahami isi pembahasan materi skripsi ini, maka perlu dipaparkan sebuah sistematika penulisan.

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 Bab yang terdiri dari Bab I akan diuraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan

¹⁴ *Ibid*, h. 82

¹⁵ *Ibid*, h. 127

penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan permasalahan pertama, yakni pembahasan mengenai penerapan sanksi pidana bagi anak pengguna narkoba, yang terdiri dari beberapa sub-sub bab yakni : faktor-faktor yang mempengaruhi sanksi pidana bagi anak, praktek persidangan atas pertanggungjawaban pidana anak, eksekusi pengadilan anak, kasus penggunaan narkoba.

Bab III menjelaskan tentang permasalahan kedua, yakni pembahasan mengenai dampak negatif dan positif penerapan sanksi pidana anak pengguna narkoba, yang terdiri dari beberapa sub-sub bab, yakni : dampak negatif pidana penjara terhadap perkembangan jiwa anak dan positif dari penerapan sanksi pidana bagi anak penyalahgunaan narkoba, realitas terpidana anak di LP Blitar.

Bab IV merupakan bab penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran, kesimpulan berisi ringkasan dari serangkaian pembahasan pada bab-bab sebelumnya, sedangkan saran berisi masukan-masukan yang penulis harapkan demi masa depan generasi muda agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba.

